

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan sejarah singkat negara Turki, hubungan antara Turki, Finlandia dan Swedia, persamaan yang dimiliki oleh Turki, Finlandia dan Swedia, proses aksesinya di NATO, dan penolakan Turki terhadap aksesinya Finlandia dan Swedia dalam keanggotaan NATO. Dalam bab ini, peneliti menjelaskan teori yang digunakan dalam menyelesaikan masalah, tujuan penelitian, hipotesa dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum terbentuknya kerajaan Turki Utsmani, bangsa Turki merupakan suku Turki yang datang dari Qayigh oghus dan tinggal di sebelah barat gurun Gobi, tepatnya di daerah Mongol dan utara China. Suku Turki yang dipimpin Erthogrol ini kemudian mengabdikan dirinya pada Sultan Alauddin II dan membantunya menghadapi peperangan dengan bangsa Romawi yang berkuasa di daerah Byzantium. Berkat bantuan suku Turki, Sultan Alauddin berhasil memenangkan pertempuran. Atas kerja keras dan jasa baik suku Turki, Sultan Alauddin kemudian menghadiahkan sebidang tanah dekat perbatasan Bizantium. Sejak saat itulah suku Turki dibawah pimpinan Erthogrol terus mengembangkan wilayahnya dan mencoba merebut wilayah Byzantium. Erthogrol meninggal pada tahun 1288, kemudian kekuasaannya dilanjutkan oleh puteranya yaitu Usman dengan persetujuan dari Sultan Saljuk. Pada tahun 1300, dalam penyerangan bangsa Mongol ke wilayah kekuasaan Saljuk, Sultan Alauddin terbunuh dan meninggalkan tahtanya tanpa pewaris. Dalam kekosongan penguasa ini, Usman memerdekakan wilayahnya dan bertahan terhadap serangan bangsa Mongol. Usman memproklamasikan kemerdekaan wilayahnya dengan nama ksultanan Usmani. Sejak saat itu, Turki terus berkembang hingga akhirnya kita mengenal Turki yang berjaya pada masa ini (Rahman, 2018).

Melihat Turki yang tidak pernah bertikai dengan negara lain dari sudut pandang sejarah berdirinya negara tersebut, Turki memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara lain. Salah satunya adalah hubungan Turki dengan Finlandia dan Swedia dapat dikatakan cukup baik. Turki, Finlandia dan Swedia memiliki beberapa kesamaan dalam beberapa tindakannya. Contohnya adalah, baik Turki, Finlandia maupun Swedia ketiganya merupakan negara yang terbuka terhadap pengungsi Suriah akibat terjadinya *Arab Spring* yang mengakibatkan banyak kekacauan (Noermanita, 2017).

Turki merupakan negara yang menerima pengungsi Suriah dengan total pengungsi sebanyak 2.6 juta pengungsi. Dapat dikatakan bahwa Turki tidak hanya menjadi *host country*, namun berperan juga sebagai negara transit dari pengungsi beberapa negara sebelum akhirnya akan dipindahkan ke beberapa negara di Eropa. Hal ini membuat Turki banyak mendapatkan apresiasi dari negara-negara lainnya atas bantuannya terhadap pengungsi Suriah. Bahkan, Turki juga menerima 600.000 juta pengungsi pada tahun 2016 hasil dari kesepakatan Turki dengan Uni Eropa terkait pengungsi ilegal di Yunani. Meskipun dengan menerima pengungsi yang jumlahnya akan terus bertambah setiap tahun, Turki siap menerima segala tantangan yang akan dihadapi kedepannya (Noermanita, 2017).

Finlandia juga terbuka terhadap pengungsi dari Suriah. Finlandia sendiri merupakan negara yang aktif dalam berbagai kegiatan perdamaian, khususnya dalam bidang *peacekeeping* (penjaga perdamaian), *peacemaking* (pembuat perdamaian) dan memberi bantuan luar negeri (Margareth, 2017). Finlandia merupakan negara yang mendeklarasikan diri sebagai negara yang terbuka dan aman. Sejak tahun 2001, Finlandia menerima 750 pengungsi setiap tahunnya, namun setelah adanya krisis yang terjadi di Suriah, total pengungsi pada tahun 2014 adalah sebanyak 1.050 pengungsi. Namun kebijakan Finlandia terhadap pengungsi sudah mulai berubah pada tahun 2015. Hal ini diakibatkan oleh kenaikan jumlah pengungsi yang drastis. Finlandia mulai menghentikan arus pencari suaka yang tidak terkendali dengan tujuan untuk meningkatkan situasi keamanan Finlandia itu sendiri. Kebijakan Finlandia terhadap pengungsi menjadi lebih tertutup bukan berarti Finlandia sudah tidak memberikan ruang untuk pengungsi, hanya saja persyaratan bagi pengungsi menjadi lebih ketat. Hal ini juga terjadi karena adanya faktor domestik seperti birokrasi di Finlandia itu sendiri dan juga opini publik yang mulai khawatir terhadap masalah yang dapat dilakukan oleh para pengungsi (Perbawani, 2017).

Swedia merupakan negara yang menerima jumlah permohonan tertinggi kedua diantara negara Uni Eropa. Swedia dikenal sebagai negara yang memperlakukan pengungsi dengan baik dengan memberikan sistem akomodasi dan penerimaan komperhensinya. Pada tahun 2013 Swedia memberi izin tinggal permanen kepada masyarakat Suriah yang mengajukan permohonan ke Swedia (Ambarani & Wahyudi, 2021).

Selain memiliki persamaan dalam memberikan tempat berlindung bagi pengungsi Suriah, terdapat satu hubungan antara Turki, Finlandia dan Swedia, yaitu adanya kerja sama dalam *peacemaking* yang didirikan pada tahun 2010 yang diberi nama *Group Friends of Mediations* yang

dicetuskan oleh Turki dan Finlandia. Kerja sama ini memiliki tujuan untuk meningkatkan penggunaan mediasi sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan konflik. (Margareth, 2017).

Dari fakta-fakta yang telah disebutkan di atas, dapat dilihat bahwasannya hubungan Turki dengan Finlandia dan Swedia berjalan dengan baik-baik saja. Namun, Turki memiliki konflik dengan Finlandia dan Swedia terkait suku Kurdi dan Partai Buruh Kurdistan atau *Partiya Karkaren Kurdistan* (PKK) yang dianggap sebagai kelompok teroris oleh Turki. Turki mengatakan bahwa Finlandia dan Swedia merupakan negara yang mendukung suku Kurdi dan PKK. Hal ini juga memunculkan konflik baru diantara Turki, Finlandia dan Swedia, yaitu Turki menolak Finlandia dan Swedia bergabung menjadi anggota *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) (Suny, 2022). Saat Finlandia dan Swedia ingin bergabung dengan NATO, Turki dengan lantang menolak bergabungnya Finlandia dan Swedia ke dalam keanggotaan NATO. Erdogan mengatakan bahwa Turki akan tetap menerapkan kebijakan dengan pasti, Erdogan telah mengatakan kepada sekutu bahwa kami tetap akan menolak keanggotaan Finlandia dan Swedia di NATO dan akan tetap seperti itu (CNN Indonesia, 2022). Penolakan Turki ini menjadi penghambat bergabungnya Finlandia dan Swedia dalam keanggotaan NATO. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan dalam peraturan NATO bahwa setiap keputusan mengenai perluasan NATO maupun penerimaan anggota baru membutuhkan persetujuan dari 30 sekutu dan parlemen (Sorongan, 2022). Penerimaan anggota baru ini juga disebut dengan akses. Dimana akses merupakan tindakan unilateral dari suatu negara untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional. Dalam proses akses, apabila negara lain yang terikat dalam perjanjian internasional tersebut tidak mengizinkan atau menyetujui sebuah negara bergabung atau mengikat diri pada perjanjian internasional, maka negara tersebut tidak dapat memulai proses akses (Aust, 2000). Turki merupakan anggota NATO sejak tahun 1952 dan menjadi salah satu mitra terbesar bagi NATO, oleh karena itu penolakan dari Turki ini menjadi salah satu faktor penghambat bagi Finlandia dan Swedia (Aydogan, 2021).

Adapun tahapan-tahapan akses anggota baru NATO adalah sebagai berikut. Tahap pertama adalah adanya pembicaraan akses dengan tim NATO. Tahap kedua adalah pengiriman surat permohonan ke NATO dan jadwal penyelesaian formasi oleh calon anggota. Tahap ketiga merupakan tahapan dimana protokol akses ditandatangani oleh semua anggota NATO. Tahap keempat yaitu diratifikasinya protokol akses selanjutnya oleh semua anggota NATO. Tahap kelima, sekjen mengundang negara calon anggota untuk menyetujui perjanjian Atlantik Utara. Tahap keenam merupakan tahap para anggota menyetujui perjanjian Atlantik Utara sesuai dengan

prosedur nasionalnya. Tahap terakhir adalah mendepositkan instrumen akses ke Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (Arani, 2022).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

Mengapa Turki menolak akses Finlandia dan Swedia dalam keanggotaan NATO?

C. Kerangka Berpikir

Menurut Pruitt, negosiasi merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan konflik karena dalam negosiasi terdapat diskusi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Ada 5 strategi dalam menyelesaikan konflik menurut Pruitt. Strategi pertama yaitu *Concession making* atau pembuatan konsesi. Dalam strategi ini konsesi akan melibatkan pengurangan tuntutan atau penawaran dalam perundingannya, sehingga pemberi konsesi memberikan keuntungan yang lebih besar kepada pihak lawan sehingga mendorong negosiasi menuju kesepakatan. Strategi kedua yaitu *Contending* atau bersaing. Strategi ini memiliki beberapa taktik agar pihak lain menerima pilihan yang menguntungkan pihak kita. Beberapa taktik tersebut adalah dengan penggunaan ancaman, pelecehan, komitmen yang tidak dapat diubah dan argumen persuasif. Strategi ketiga yaitu *withdrawal* atau mengundurkan diri. Strategi menarik diri ini menghentikan negosiasi sehingga tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Tidak tercapainya kesepakatan antara dua pihak ini adalah kemenangan sesungguhnya bagi strategi *withdrawal*. Strategi keempat yaitu *inaction* atau bertindak lamban. Taktik dalam strategi ini adalah membuang waktu, sehingga strategi ini dapat digunakan untuk menunggu penggunaan strategi lain yang dipandang lebih tepat. Strategi yang terakhir adalah *Problem Solving*, strategi ini melibatkan upaya untuk menemukan kesepakatan yang dapat diterima bersama. Ada banyak taktik dalam *Problem Solving* (Pruitt & Carnavale, 1993).

Teknik *Problem Solving* melibatkan pemecahan masalah bersama, dimana kedua belah pihak bekerja sama untuk menemukan alternatif yang dapat diterima bersama. Ada juga yang melibatkan pemecahan masalah individu, dimana salah satu atau kedua belah pihak bertindak sendiri. *Problem Solving* ini mengarah kepada *win-win solution* apabila ada potensi integratif dan pihak yang ambisius dan realistis disaat yang bersamaan. *Win-win solution* berarti penyelesaian masalah atau solusi yang saling menguntungkan dan memuaskan semua pihak. Ada beberapa cara untuk menjalankan *win-win solution* dalam teknik *problem solving*. Pertama yaitu Memperbesar kue (*expanding the pie*), merupakan kesepakatan yang dibangun dengan cara meningkatkan sumber daya yang dimiliki hingga mampu mencapai apa yang diinginkan oleh pihak yang bernegosiasi.

Kedua, pemotongan biaya (*cost cutting*). Dimana salah satu pihak akan menerima apa yang diinginkan dengan mengurangi biaya pihak lain karena adanya pembuatan konsesi. Ketiga adalah memberikan kompensasi (*compensation*), dimana salah satu pihak akan memberikan suatu imbalan kepada pihak lainnya karena telah membuat konsesi. Keempat adalah *logrolling* atau disebut juga ketika masing-masing pihak yang sedang bernegosiasi bersedia untuk membuat konsesi di bidang-bidang yang menjadi prioritas bagi masing-masing pihak. Terakhir adalah menjembatani, yang digunakan ketika suatu pilihan yang sepenuhnya baru dikembangkan untuk memuaskan tujuan utama pihak-pihak yang bernegosiasi (Pruitt & Carnavale, 1993).

Selama ini Turki memiliki konflik dengan Finlandia dan Swedia terkait dengan PKK dan Suku Kurdi. Finlandia dan Swedia memberikan dukungan terhadap PKK dan Suku Kurdi, sementara Turki menganggap PKK dan Suku Kurdi sebagai gerakan teroris separatis. Turki kemudian menggunakan taktik *Problem Solving* sebagai alat untuk memenangkan konflik dengan Finlandia dan Swedia terkait Suku Kurdi dan PKK dengan asumsi bahwa ada hubungan saling membutuhkan sehingga pilihan ini mampu menyelesaikan konflik dengan baik.

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka teori dan rumusan masalah yang telah dipaparkan yakni : “Mengapa Turki menolak aksesi Finlandia dan Swedia dalam keanggotaan NATO?”. Maka hipotesa yang diambil untuk penelitian ini adalah Turki menolak aksesi Finlandia dan Swedia dalam keanggotaan NATO karena ingin memaksa kedua negara tersebut untuk melakukan konsesi atas dukungannya terhadap Suku Kurdi dan PKK.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan mengapa Turki menolak bergabungnya Finlandia dan Swedia dalam keanggotaan NATO.
2. Untuk mengetahui prosedur penerimaan anggota baru di NATO.
3. Untuk mengetahui strategi perundingan yang dilakukan oleh Turki untuk mengatasi konflik dengan Finlandia dan Swedia mengenai Suku Kurdi dan PKK.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan penelitian eksplanatif. Dimana penelitian ini digunakan untuk menjelaskan perubahan fenomena yang sedang terjadi. Fenomena yang menjadi isu dalam penelitian ini adalah respon Turki terhadap bergabungnya Finlandia dan Swedia ke dalam keanggotaan NATO. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini menggunakan data skunder dimana sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jurnal ilmiah dan berita-berita online mengenai Turki, Finlandia, Swedia dan NATO. Data yang dinilai valid kemudian di proses dan dianalisa kemudian dipergunakan untuk mendeskripsikan respon Turki terhadap bergabungnya Finlandia dan Swedia ke dalam keanggotaan NATO. Data data yang diperlukan adalah mekanisme penerimaan anggota baru di NATO, bentuk dukungan Finlandia dan Swedia terhadap Suku Kurdi, dan peran Turki sebagai anggota NATO.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini terbatas kepada respon Turki terhadap aksesi Finlandia dan Swedia dalam keanggotaan NATO tahun 2022.

H. Sistematika Penulisan

BAB I merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesis, tujuan penelitian, metodologi penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan bagian yang menjelaskan mengenai dinamika konflik antara Turki, Finlandia dan Swedia.

BAB III merupakan bagian yang menjelaskan mengenai penggunaan taktik negosiasi konsesi dan kompensasi Turki.

BAB IV merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian.